

**STRATEGI TRANSFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN  
MELALUI PENGUATAN BANK SAMPAH DAN TPS3R DI KOTA SUNGAI PENUH**

**Metri Deritalina**

Perencana Ahli Muda, Pemerintah Kota Sungai Penuh

Email Korespondensi: deritalinametri@gmail.com

**ABSTRACT**

Urban waste management faces increasing challenges due to rising waste generation, limited treatment capacity, low community participation, and weak institutional governance. Sungai Penuh City generated 18,703.15 tons of waste annually in 2025, while source-based waste reduction through Waste Banks and Reduce, Reuse, Recycle (3R) Waste Treatment Facilities (TPS3R) remained suboptimal. This study aims to analyze the main problems and formulate policy strategies for sustainable waste management transformation through strengthening Waste Banks and TPS3R in Sungai Penuh City. The study employed a policy analysis approach using Urgency, Seriousness, and Growth (USG), problem-tree analysis, SWOT analysis, and policy alternative assessment based on William N. Dunn's criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. Data were collected through document analysis and semi-structured interviews with four waste-management stakeholders. The USG analysis identified suboptimal source-based waste reduction as the highest-priority problem, with a score of 57. Policy feasibility assessment showed that strengthening waste-management policy and institutions achieved the highest score of 8.8, followed by optimization of Waste Banks and TPS3R at 8.3 and community education and incentives at 8.0. The findings indicate that waste-management transformation requires an integrated approach in which regulatory and institutional strengthening serves as the foundation, while Waste Banks, TPS3R, education, and incentives function as complementary operational instruments.

**Keywords:** Waste management, Waste bank, TPS3R, Public policy, Circular economy.

**ABSTRAK**

Pengelolaan sampah di daerah perkotaan menghadapi tantangan berupa peningkatan timbulan sampah, keterbatasan kapasitas pengolahan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya tata kelola kelembagaan. Kota Sungai Penuh menghasilkan timbulan sampah sebesar 18.703,15 ton per tahun pada 2025, sementara pengurangan sampah dari sumber melalui Bank Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan dan merumuskan strategi kebijakan transformasi pengelolaan sampah berkelanjutan melalui penguatan Bank Sampah dan TPS3R di Kota Sungai Penuh. Penelitian menggunakan pendekatan analisis kebijakan dengan metode Urgency, Seriousness, Growth (USG), analisis pohon masalah, SWOT, dan evaluasi alternatif kebijakan berdasarkan kriteria William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Data diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara semi-terstruktur terhadap empat pemangku kepentingan pengelolaan sampah. Hasil analisis USG menunjukkan bahwa belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber merupakan masalah prioritas dengan skor 57. Evaluasi alternatif menunjukkan bahwa penguatan kebijakan dan kelembagaan memperoleh skor tertinggi sebesar 8,8, diikuti optimalisasi Bank Sampah dan TPS3R sebesar 8,3 serta edukasi dan insentif masyarakat sebesar 8,0. Temuan menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan sampah memerlukan pendekatan terintegrasi yang menempatkan penguatan regulasi dan kelembagaan sebagai fondasi, sedangkan Bank Sampah, TPS3R, edukasi, dan insentif menjadi instrumen operasional pendukung.

**Kata kunci:** Pengelolaan sampah, Bank sampah; TPS3R, Kebijakan publik, Ekonomi sirkular.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu persoalan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi berkontribusi terhadap peningkatan volume dan keragaman sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menempatkan pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha serta mengarahkan pengelolaan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Regulasi tersebut juga menegaskan pentingnya pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis dan berkelanjutan.

Perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul–angkut–buang menuju pengurangan dari sumber menjadi semakin penting. Perpres Nomor 97 Tahun 2017 menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas) sebagai kerangka nasional pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan ke tingkat daerah melalui Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada). Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya dituntut meningkatkan kapasitas pengangkutan dan pemrosesan akhir, tetapi juga membangun sistem pengurangan sampah di tingkat sumber.

Dalam konteks tersebut, Bank Sampah dan TPS3R menjadi instrumen penting karena menghubungkan dimensi lingkungan, sosial, kelembagaan, dan ekonomi. Bank Sampah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberian nilai ekonomi terhadap material yang dapat didaur ulang. Sementara itu, TPS3R berperan sebagai fasilitas pengolahan skala kawasan untuk mengurangi volume sampah yang harus dikirim ke tempat pemrosesan akhir. Penelitian mengenai Bank Sampah di berbagai daerah menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, kapasitas pengelola, dukungan pemerintah, tata kelola kelembagaan, insentif, serta akses terhadap pasar material daur ulang (Rachman et al., 2021; Saputra et al., 2022; Yandri et al., 2024).

Kajian mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga menunjukkan bahwa Bank Sampah tidak semata-mata berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah bernilai ekonomi. Bank Sampah dapat menjadi institusi sosial yang memperkuat jejaring masyarakat, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan mendukung praktik ekonomi sirkular. Istiyani dan Handayani (2022), misalnya, menunjukkan bahwa inisiatif ekonomi sirkular berbasis komunitas melalui Bank Sampah dapat memperkuat hubungan lintas sektor dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan Bank Sampah membutuhkan ekosistem kelembagaan yang memungkinkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pelaku daur ulang berjalan secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut relevan dengan Kota Sungai Penuh. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, jumlah penduduk pada 2025 mencapai 102.483 jiwa dengan timbulan sampah sebesar 18.703,15 ton per tahun atau sekitar 51,24 ton per hari. Timbulan tersebut tersebar di delapan kecamatan dengan variasi sesuai jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat.

**Tabel 1: Timbulan Sampah Kota Sungai Penuh Tahun 2025**

| No.          | Kecamatan       | Jumlah Penduduk | Timbulan Sampah (ton/tahun) |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 1            | Sungai Penuh    | 10.622          | 1.938,52                    |
| 2            | Pesisir Bukit   | 13.005          | 2.373,41                    |
| 3            | Hamparan Rawang | 16.247          | 2.965,08                    |
| 4            | Tanah Kampung   | 11.201          | 2.044,18                    |
| 5            | Kumun Debai     | 11.194          | 2.042,91                    |
| 6            | Pondok Tinggi   | 18.848          | 3.439,76                    |
| 7            | Koto Baru       | 9.971           | 1.819,71                    |
| 8            | Sungai Bungkal  | 11.395          | 2.079,59                    |
| <b>Total</b> |                 | <b>102.483</b>  | <b>18.703,15</b>            |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, 2025.

Kecamatan Pondok Tinggi menghasilkan timbunan sampah tertinggi sebesar 3.439,76 ton per tahun dan memiliki jumlah penduduk terbesar. Sebaliknya, Koto Baru memiliki jumlah penduduk dan timbunan sampah terendah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara jumlah penduduk, aktivitas masyarakat, dan timbunan sampah. Namun, pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk. Perilaku pemilahan, pola konsumsi, kapasitas pelayanan, serta keberadaan fasilitas pengolahan juga menentukan volume sampah yang akhirnya masuk ke sistem pengangkutan dan pemrosesan akhir.

Permasalahan utama Kota Sungai Penuh bukan hanya peningkatan timbunan sampah, tetapi belum optimalnya pengurangan sampah sejak dari sumber. Sistem pengelolaan yang masih berorientasi pada pengumpulan dan pengangkutan menyebabkan ketergantungan terhadap fasilitas pemrosesan akhir tetap tinggi. Pada saat yang sama, Bank Sampah dan TPS3R belum sepenuhnya berfungsi sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan sampah daerah.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Bank Sampah membutuhkan kombinasi antara kelembagaan, partisipasi, insentif ekonomi, kapasitas pengelola, dan dukungan regulasi. Yandri et al. (2024) menemukan bahwa keberlanjutan Bank Sampah berkaitan dengan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi, serta tata kelola kelembagaan. Studi Juriani dan Anugrahini juga menunjukkan bahwa Bank Sampah mampu berfungsi sebagai instrumen perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, tetapi menghadapi persoalan partisipasi yang tidak konsisten, kapasitas penyimpanan, fasilitas, dan ketidakstabilan pasar material daur ulang.

Meskipun berbagai studi telah membahas Bank Sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, masih diperlukan analisis kebijakan yang mengintegrasikan persoalan kelembagaan, Bank Sampah, TPS3R, dan partisipasi masyarakat dalam konteks pemerintah daerah yang memiliki karakteristik wilayah tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana strategi kebijakan yang paling layak untuk mentransformasi pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Sungai Penuh melalui penguatan Bank Sampah dan TPS3R?

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi masalah prioritas, menganalisis akar penyebab, membandingkan alternatif kebijakan, dan merumuskan strategi kebijakan yang dapat diterapkan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis kebijakan publik. Lokasi penelitian adalah Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Data penelitian terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa data timbunan sampah, dokumen pengelolaan persampahan daerah, regulasi, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan empat pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, pengelola Bank Sampah MAPAN, dan pengelola TPS3R. Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, identifikasi prioritas masalah menggunakan metode USG dengan skala 1–5 berdasarkan tiga dimensi, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Kedua, analisis pohon masalah untuk mengidentifikasi penyebab langsung dan penyebab mendasar dari masalah prioritas. Ketiga, penyusunan dan analisis tiga alternatif kebijakan menggunakan SWOT. Keempat, penilaian kelayakan alternatif menggunakan enam kriteria Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penilaian kelayakan menggunakan skala 1-10. Nilai setiap alternatif dihitung berdasarkan rata-rata penilaian empat narasumber. Alternatif dengan nilai rata-rata tertinggi ditetapkan sebagai alternatif prioritas, sementara alternatif lainnya diposisikan sebagai kebijakan pendukung.

## PEMBAHASAN

Identifikasi permasalahan terkait belum optimalnya transformasi pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Sungai Penuh dilakukan dengan menggunakan metode USG (urgency,

seriousness, growth). Metode ini merupakan salah satu pendekatan dalam analisis kebijakan publik yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah secara sistematis berdasarkan tingkat urgensi, tingkat dampak, serta potensi perkembangan masalah di masa depan (Bryson, 2004). Metode USG banyak digunakan dalam analisis kebijakan publik dan manajemen strategis sektor publik untuk menilai tingkat kepentingan suatu permasalahan secara sistematis dan terukur.

Pendekatan ini menjadi relevan dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh, khususnya dalam mendorong transformasi menuju pengelolaan sampah berkelanjutan melalui penguatan bank sampah dan TPS3R. Dengan menggunakan metode USG, permasalahan tidak hanya diidentifikasi secara deskriptif, tetapi juga dianalisis berdasarkan tingkat prioritasnya, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan intervensi kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Secara konseptual, urgency menunjukkan tingkat kebutuhan untuk segera menangani permasalahan pengelolaan sampah yang terus meningkat. Seriousness menggambarkan besarnya dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan beban pengelolaan daerah. Sementara growth menunjukkan potensi perkembangan masalah yang semakin kompleks apabila tidak ditangani secara tepat.

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Pengurangan sampah dari sumber belum optimal;
2. Partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah masih rendah;
3. Kinerja bank sampah belum optimal;
4. TPS3R belum berfungsi secara maksimal;
5. Sistem pengelolaan sampah masih didominasi pola kumpul-angkut-buang;

Hasil wawancara semi-terstruktur terhadap empat narasumber disajikan pada table 2 berikut :

**Tabel 2: Hasil Penilaian USG oleh Empat Responden**

| No | Sumber Masalah                               | Urgency | Seriousness | Growth | Total Nilai | Prioritas |
|----|----------------------------------------------|---------|-------------|--------|-------------|-----------|
| 1  | Pengurangan sampah dari sumber belum optimal | 18      | 20          | 19     | 57          | I         |
| 2  | Partisipasi masyarakat masih rendah          | 19      | 19          | 18     | 56          | II        |
| 3  | Kinerja bank sampah belum optimal            | 17      | 19          | 19     | 55          | III       |
| 4  | TPS3R belum berfungsi maksimal               | 17      | 19          | 17     | 53          | IV        |
| 5  | Sistem kumpul-angkut-buang masih dominan     | 18      | 16          | 16     | 50          | V         |

Sumber: Hasil Wawancara

Keterangan :

U=Urgency, S=Seriousness, G=Growth, T=Total

Bobot Nilai :

5 = Sangat Mendesak/Sangat Serius/Menjadi Sangat Kompleks; 4 = Penting/Serius/Kompleks; 3 = Biasa; 2 = Tidak Mendesak/Tidak Serius/Tidak Begitu Kompleks; 1 = Sangat Tidak Mendesak/Sangat Tidak Serius/Sangat Tidak Kompleks

Berdasarkan hasil penilaian USG oleh empat responden, permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh adalah pengurangan sampah dari sumber yang belum optimal, dengan total nilai tertinggi sebesar **57** dan menempati prioritas pertama. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengurangan sampah dari hulu merupakan isu paling mendesak, memiliki dampak paling besar, serta berpotensi terus berkembang apabila tidak segera ditangani.

Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini belum mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara signifikan dalam melakukan pemilahan dan pengurangan sampah dimulai dari sumbernya.

## Masalah Utama, Pohon Masalah, dan Pernyataan Masalah

Berdasarkan hasil penilaian USG oleh keempat responden dengan peran berbeda dalam transformasi pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh, total nilai USG dapat di akumulasi untuk menentukan permasalahan utama dengan nilai USG paling tinggi. Hasil rekapitulasi disajikan pada tabel 6 berikut:

**Tabel 3: Hasil Penilaian USG oleh Empat Responden**

| No | Sumber Masalah                               | Urgency | Seriousness | Growth | Total Nilai | Prioritas |
|----|----------------------------------------------|---------|-------------|--------|-------------|-----------|
| 1  | Pengurangan sampah dari sumber belum optimal | 18      | 20          | 19     | 57          | I         |
| 2  | Partisipasi masyarakat masih rendah          | 19      | 19          | 18     | 56          | II        |
| 3  | Kinerja bank sampah belum optimal            | 17      | 19          | 19     | 55          | III       |
| 4  | TPS3R belum berfungsi maksimal               | 17      | 19          | 17     | 53          | IV        |
| 5  | Sistem kumpul-angkut-buang masih dominan     | 18      | 16          | 16     | 50          | V         |

Sumber: Hasil Wawancara

Urutan masalah pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pengurangan sampah dari sumber yang belum optimal merupakan masalah utama dalam pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh. Permasalahan ini berdampak langsung pada meningkatnya timbulan sampah yang tidak terkendali, serta memperbesar beban pengelolaan pada tahap hilir. Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan belum terjadinya transformasi sistem pengelolaan sampah dari pola konvensional menjadi sistem yang berorientasi pada pengurangan sampah dari sumber.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penilaian USG dan wawancara dengan responden, penyebab permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Penyebab Masalah Level 1 :

- Partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah masih rendah
- Kinerja bank sampah belum optimal
- TPS3R belum berfungsi maksimal
- Sistem pengelolaan masih didominasi kumpul-angkut-buang

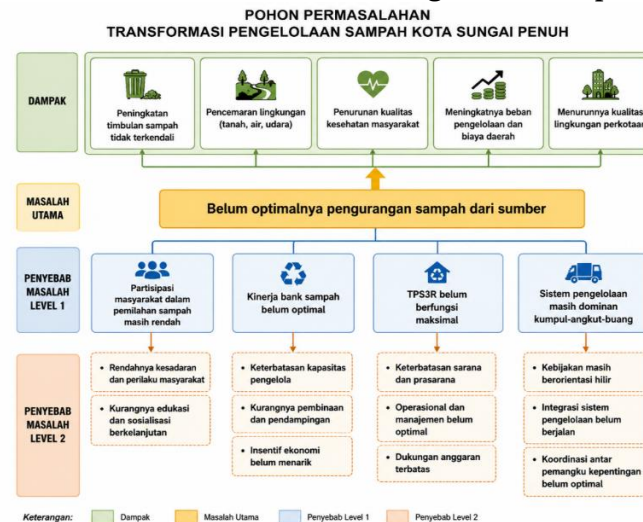
Penyebab Masalah Level 2 :

- Rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat
- Kurangnya edukasi dan sosialisasi berkelanjutan
- Keterbatasan kapasitas pengelola
- Kurangnya pembinaan dan pendampingan
- Keterbatasan sarana dan prasarana
- Dukungan anggaran belum optimal
- Kebijakan masih berorientasi pada penanganan di hilir
- Koordinasi antar pemangku kepentingan belum optimal

Dengan demikian, hasil analisis USG menegaskan bahwa belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber merupakan akar permasalahan utama yang memengaruhi seluruh sistem pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh.

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek perilaku masyarakat dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana, tetapi juga pada penguatan peran bank sampah dan TPS3R serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber. Hubungan antara masalah utama dengan penyebab masalah level satu dan dua ditunjukkan pada Gambar 1.

**Gambar 1: Pohon Permasalahan Transformasi Pengelolaan Sampah Kota Sungai Penuh**



Sumber: Hasil Analisis

Gambar pohon permasalahan menunjukkan bahwa belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber merupakan masalah utama dalam transformasi pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh. Masalah ini menjadi inti persoalan karena pengurangan sampah dari sumber merupakan fondasi utama dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Apabila pengurangan sampah belum berjalan secara efektif, maka volume sampah yang harus diangkut dan diproses akan terus meningkat, sehingga menambah tekanan terhadap sistem pengelolaan persampahan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pohon permasalahan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sistematis antara akar penyebab, masalah utama, dan dampak yang ditimbulkan. Analisis ini menegaskan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek perilaku masyarakat, kelembagaan, tata kelola, dan kebijakan. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang dirumuskan harus diarahkan pada penguatan partisipasi masyarakat, optimalisasi kinerja bank sampah dan TPS3R, serta transformasi sistem pengelolaan sampah dari pola kumpul-angkut-buang menuju pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berbasis pengurangan dari sumber.

### Alternatif Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab II, permasalahan utama dalam transformasi pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh terletak pada belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, belum optimalnya kinerja bank sampah dan TPS3R, serta masih dominannya sistem pengelolaan sampah dengan pola kumpul-angkut-buang. Oleh karena itu, diperlukan alternatif kebijakan yang tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan utama, tetapi juga dapat mengatasi akar persoalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan utama “Belum Optimalnya Pengurangan Sampah dari Sumber”, makalah ini mengusulkan beberapa alternatif kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat.

2. Optimalisasi Bank Sampah dan TPS3R sebagai Instrumen Pengurangan Sampah dari Sumber.
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Edukasi dan Insentif Pengelolaan Sampah.

Ketiga alternatif kebijakan perlu dilakukan analisis kelayakan sesuai dengan konteks transformasi pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Sungai Penuh. Makalah ini menggunakan teknik yang direkomendasikan oleh Dunn (2016) meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), responsivitas, dan ketepatan (appropriateness). Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana masing-masing alternatif kebijakan mampu menjawab permasalahan pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh secara komprehensif. Hasil analisis kelayakan untuk setiap alternative kebijakan dengan keenam aspek yang dinilai direkapitulasi pada Tabel 4.

**Tabel 4: Hasil Analisis Kelayakan Kebijakan Setiap Alternatif**

| Alternatif Kebijakan                        | Narasumber   | Efektivitas | Efisiensi | Kecukupan | Pemerataan | Responsivitas | Ketepatan | Rata-rata |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
| Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan         | Narasumber 1 | 9           | 8         | 9         | 8          | 8             | 9         | 8,5       |
|                                             | Narasumber 2 | 10          | 8         | 9         | 8          | 9             | 10        | 9,0       |
|                                             | Narasumber 3 | 9           | 8         | 9         | 8          | 8             | 9         | 8,5       |
|                                             | Narasumber 4 | 10          | 8         | 9         | 8          | 9             | 10        | 9,0       |
|                                             | Rata-rata    | 9,5         | 8,0       | 9,0       | 8,0        | 8,5           | 9,5       | 8,8       |
| Optimalisasi Bank Sampah dan TPS3R          | Narasumber 1 | 8           | 7         | 8         | 8          | 8             | 8         | 7,8       |
|                                             | Narasumber 2 | 9           | 8         | 9         | 8          | 9             | 9         | 8,7       |
|                                             | Narasumber 3 | 8           | 7         | 8         | 8          | 8             | 8         | 7,8       |
|                                             | Narasumber 4 | 9           | 8         | 9         | 8          | 9             | 9         | 8,7       |
|                                             | Rata-rata    | 8,5         | 7,5       | 8,5       | 8,0        | 8,5           | 8,5       | 8,3       |
| Edukasi dan Insentif Partisipasi Masyarakat | Narasumber 1 | 8           | 7         | 7         | 8          | 9             | 8         | 7,8       |
|                                             | Narasumber 2 | 8           | 7         | 8         | 9          | 9             | 8         | 8,2       |
|                                             | Narasumber 3 | 8           | 7         | 7         | 8          | 9             | 8         | 7,8       |
|                                             | Narasumber 4 | 8           | 7         | 8         | 9          | 9             | 8         | 8,2       |
|                                             | Rata-rata    | 8,0         | 7,0       | 7,5       | 8,5        | 9,0           | 8,0       | 8,0       |

Sumber: Hasil Analisis

Keterangan :

- Skala 1–10 : 1 = sangat rendah/tidak layak, 10 = sangat tinggi/sangat layak.

Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa alternatif penguatan kebijakan dan kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 8,8. Alternatif ini dinilai paling efektif dan tepat karena mampu menjadi fondasi utama dalam transformasi pengelolaan sampah berkelanjutan melalui penguatan tata kelola, koordinasi, dan integrasi kebijakan. Alternatif optimalisasi bank sampah dan TPS3R memperoleh nilai rata-rata sebesar 8,3. Alternatif ini dinilai sangat penting karena berfungsi langsung dalam pengurangan sampah dari sumber serta mendukung pengolahan sampah di tingkat kawasan. Namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta kapasitas pengelola.

Sementara itu, alternatif peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan insentif memperoleh nilai rata-rata sebesar 8,0. Alternatif ini memiliki nilai responsivitas tertinggi karena secara langsung menyentuh perilaku dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun, implementasinya membutuhkan konsistensi program dan waktu yang relatif panjang untuk menghasilkan perubahan perilaku secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis kelayakan kebijakan,

dapat disimpulkan bahwa penguatan kebijakan dan kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan alternatif kebijakan paling strategis untuk dijadikan prioritas utama. Sementara itu, optimalisasi bank sampah dan TPS3R serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan insentif dapat dijalankan sebagai kebijakan pendukung yang saling melengkapi guna mewujudkan transformasi pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Sungai Penuh.

## Rekomendasi Kebijakan

Dari hasil analisis Dunn yang bersumber dari wawancara empat narasumber, menunjukkan bahwa penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Sampah berkelanjutan merupakan alternatif kebijakan paling layak dan strategis untuk dijadikan prioritas. Bentuk kebijakan yang direkomendasikan adalah kebijakan regulative dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda dipilih karena memiliki daya ikat hukum yang kuat dan berlaku umum di wilayah Kota Sungai Penuh. Kebijakan ini diputuskan melalui mekanisme pembentukan produk hukum daerah oleh Walikota Sungai Penuh bersama DPRD Kota Sungai Penuh, dengan melibatkan

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, analisis akar penyebab, dan evaluasi alternatif kebijakan menggunakan metode William N. Dunn melalui kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, maka policy paper ini merekomendasikan satu kebijakan yaitu Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Kota Sungai Penuh, dengan melibatkan perangkat daerah teknis seperti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Bagian Hukum Setda.

Kebijakan ini dinilai mampu menyelesaikan masalah karena memberikan kepastian kelembagaan, meningkatkan efektivitas koordinasi, memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta mendukung pencapaian target pengurangan sampah daerah secara berkelanjutan. Melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan, Pemerintah Kota Sungai Penuh memiliki dasar yang lebih kuat untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Agar rekomendasi kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan langkah implementasi yang sistematis penyusunan Perda Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Sampah berkelanjutan sebagai berikut :

1. Identifikasi dan perencanaan, yaitu mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan regulasi serta mengusulkan Raperda ke dalam Propemperda.
2. Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda, dengan melibatkan perangkat daerah terkait seperti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Bagian Hukum, serta tenaga ahli.
3. Harmonisasi dan konsultasi publik, untuk memastikan kesesuaian Raperda dengan peraturan yang lebih tinggi serta memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
4. Pembahasan dan persetujuan, yaitu pembahasan Raperda antara Pemerintah Kota dan DPRD hingga memperoleh persetujuan bersama.
5. Penetapan dan pengundangan, berupa penetapan Raperda menjadi Perda oleh Wali Kota dan pengundangnya dalam Lembaran Daerah.
6. Implementasi dan evaluasi, melalui penyebaran Perda, pelaksanaan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas pengelolaan sampah berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kebijakan menggunakan kriteria William N. Dunn, penguatan kebijakan dan kelembagaan pengelolaan sampah berkelanjutan merupakan alternatif yang perlu diprioritaskan di Kota Sungai Penuh. Kebijakan tersebut diarahkan melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan dan tanggung jawab kelembagaan, serta memperkuat koordinasi dan partisipasi masyarakat. Implementasi Perda secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan mendukung terwujudnya lingkungan Kota Sungai Penuh yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Dunn, W. N. (2016). *Public policy analysis: An integrated approach* (5th ed.). Routledge.
- Fatmawati, N., Mustari, N., Haerana, Niswaty, R., & Abdillah. (2022). Waste bank policy implementation through collaborative approach: Comparative study—Makassar and Bantaeng, Indonesia. *Sustainability*, 14, 7974. <https://doi.org/10.3390/su14137974>
- Istiyani, A., & Handayani, W. (2022). Embedding community-based circular economy initiatives in a polycentric waste governance system: A case study. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 7(2), 51–59. <https://doi.org/10.14710/ijpd.7.2.51-59>
- Juriani, T., & Anugrahini, T. (2025). The roles and challenges of a community-based waste bank: A case of Bank Sampah Teratai in South Tangerang, Indonesia. *ARISTO*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Pemerintah Kota Sungai Penuh. (2025). *Data timbulan sampah Kota Sungai Penuh Tahun 2025*. Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh.
- Pemerintah Kota Sungai Penuh. (2024). *Dokumen informasi kinerja pengelolaan sampah Kota Sungai Penuh*. Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Rachman, I., Komalasari, N., & Hutagalung, I. R. (2021). Community participation on waste bank to facilitate sustainable solid waste management in a village. *Journal of Environmental Science and Sustainable Development*, 4(2), 327–345.
- Saputra, T., Nurpeni, Astuti, W., Harsini, Nasution, S. R., Eka, & Zuhdi, S. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 246–251.
- Setyarini, S. V., Subowo, A., & Afrizal, T. (2021). Waste bank program in sustainable development efforts of Semarang district. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(1). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i1.29795>
- Suryani, A. S. (2014). Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah: Studi kasus Bank Sampah Malang. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(1), 71–84.
- Wolf, C., & Floyd, S. W. (2017). Strategic planning research: Toward a theory-driven agenda. *Journal of Management*, 43(6), 1754–1788. <https://doi.org/10.1177/0149206313478185>
- Yandri, P., Budi, S., & Muhyidin, A. (2024). Formulasi dan validasi indikator bank sampah berkelanjutan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 15(2). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v15i2.3629>
- Yulian, L., & Yandri, P. (2022). The organizational development strategy of a waste bank at Bank Sampah Regensi by using SWOT analysis. *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi*, 6(2), 59–74. <https://doi.org/10.33753/mandiri.v6i2.193>